

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 2017).
- Bernard L. Tanya, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015).
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2016).
- Friedman, Lawrence M., *Legal Theory*, (New York: Columbia University Press, 1967).
- H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).
- Haidir Rachman, *Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bekasi: CV. Intelektual Writer, 2021).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2013).
- Jamal Wiwoho dan Lulik Djatikumoro, *Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).
- M. Jafar Sunarno, *Pengantar Nilai Pabean*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013).

- Mochtar Kusumaatmadja & Arief Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Hidup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000).
- Mohammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Study Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Medinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2012).
- Mohammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007).
- Muhammad Jafar Saidi, *Hukum Acara Pengadilan Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- N.E. Algra dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 2016).
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 2018).
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind. Hill Co., 2019).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).
- Rawls, John, *A Theory of Justice, Revised Edition*, (New York: Oxford University Press, 1999).
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004).
- Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Pers, 2010).
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997).
- Sjahan Basah, *Ilmu Negara*, (Bandung: Alumni, 1997).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*, (Jakarta: UI Press, 2013).
- Sophar Maru Hutagalung, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Tangerang: Tangerang Pustaka Mandiri, 2022).
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 2013).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005).
- Sulistyo Widayanto, *Prosedur Notifikasi WTO untuk Transparansi Kebijakan Impor Terkait Bidang Perdagangan, Kewajiban Pokok Indonesia sebagai Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization)*, (Jakarta: Direktorat Kerja Sama Multilateral Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2011).
- Sunaryati Hartono, *Apakah the Rule of Law*, (Bandung: Alumni, 2016).
- Sundoro, *Studi Kasus Banding Pengadilan Pajak*, (Jakarta: Semar Publishing, 2004).
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Taufiqurrahman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2019).
- Titus, Harold H., et al, *Living Issues In Philosophy*, Alih Bahasa H.M Rasyid, *Persoalan Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014).

Wagiman dan Mandagi, Anasthasya Saartje, *Terminologi Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Tesis:

Dwiyana Harjanthi, “Hubungan Antara Pelaksanaan Audit Kepabebean Atas Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Oleh Direktorat Audit Pada Kantor Pisat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Upaya Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Negara”, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2011.

Jurnal:

Astu Unadi, Reni Yuliana Gultom, dan Ermi Sukasih, “Rekayasa Teknologi Mesin Pengepres Pakan Blok”, *Jurnal Enjiniring Pertanian*, Vol. V, No. 1, April 2007.

Budi Ispriyarso, “Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak”, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018.

Deaf Wahyuni Ramadhani, “Revitalisasi Nilai Pancasila dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana di Bidang Kepabebean di Indonesia”, *Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol 5 No 1 April 2017.

Hanggoro Pamungkas, “Penyelesaian Sengketa Pajak”, *Binus Business Review* Vol. 2 No. 1 Mei 2011.

Lamijan dan Mohamad Tohari, “Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No 01, 2022.

Melisa Anggia Sitanggang, August Silaen, Rinsofat Naibaho, “Peran dan Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabebean (Studi Kasus: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)”, *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 07 No. 01, April 2018.

Muh. Ridha Hakim, “Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2, Juli 2018.

Muhammad Abdur Rozaq, dkk, “Pajak sebagai Implementasi Ideologi Pancasila dalam Menangkal Dampak Negatif Pengaruh Paham Kapitalisme”, *Jurnal Serina Sosial Humaniora* Vol. 1, No. 3, Oktober 2023.

Nabitatus Sa'adah dan Kadek Cahya Susila Wibawa, "Batasan Kewenangan Mengadili Sengketa Pajak Antara Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52 No.1, Maret 2023.

Puguh Susilo Pradityo dkk, "Dinamika Jagung Lokal Yang Diserap Pabrik Pakan Tahun 2019 – 2021", *Jurnal Nutrisi Ternak Tropis dan Ilmu Pakan* Maret 2023.

Rezki Anta Triputra Milala, Tjip Ismail, "Penerimaan Negara dan Pengawasan Pabean Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai", *Jurnal Yuridis* Vol. 9 No. 2, Desember 2022.

Satria Nur Ramadhana, Eka Ningsih Puji Rahayu, "Efektifitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Bahan Pakan Ternak Yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan", *Jurnal Akuntansi Akuisisi*, Vol. 18, No. 2, 2022.

Makalah:

Bagir Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah", *Makalah* pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000.

Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Implementasi Pasal 23 A UUD Negara Republik Indonesia dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak", *Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Makalah* Pada Penataan Hukum Administrasi, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267 /PMK.010/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.010/2017 Tentang Kriteria dan/ atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Putusan Peradilan:

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002192.45/2018/PP/M.VIIB tertanggal 28 Februari 2019.

Putusan Pengadilan Pajak PUT-010402.45/2020/PP/M.XVIIA Tertanggal 23 Maret 2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1738/B/PK/Pjk/2020 tertanggal 10 Juni 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2684/B/PK/Pjk/2022 tertanggal 12 Mei 2022.